

**PENGAMBILAN HASIL GADAI LAHAN SAWIT DAN KARET  
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGADAI MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**(Studi di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah*

*Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Disusun Oleh:**

NAMA:SADDAM HASRI

NIM :10922007477

**PROGRAM S1**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2013**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan akhir pada Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1), maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada Masyarakat yang melakukan pegadaian tidak sesuai dengan

standar syariah dengan maksud dan tujuan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang penulis peroleh dari bangku kuliah selama beberapa tahun terakhir.

Selain itu diharapkan hasil penelitian yang penulis temukan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah konkrit terkait dengan masalah-masalah yang masyarakat hadapi selama ini khususnya yang berhubungan dengan Pengambilan Hasil Gadai Lahan Sawit Dan Karet Serta Dampaknya Terhadap Penggadai Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir).

Namun demikian, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan baik dari segi isi maupun penyajiannya yang dikarenakan oleh keterbatasan tenaga, dana dan waktu serta literatur lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang turut mendukung dan memberikan motivasi baik berupa moril maupun material kepada penulis, khususnya kepada:

1. (Alm) Ayahanda Hasan Basri dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, terima kasih juga buat Kakanda Iptu Afrizal SH, Kakak Eva Susanti, Kakak Erawati S.Pd,

Kakanda Briptu Afriadi, Briptu Kurnia Rahman, dan Adinda Alfarabi yang selama ini banyak memberikan semangat dan, Ananda hanya bisa berdoa mudah-mudahan budi baik ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga besar ananda dibalas oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya,

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan Mag, MPd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.
4. Ibu Dr. Hertina, MPd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
5. Bapak Kastulani, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
6. Bapak Drs.H.Ahmad Darbi B, Mag selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
7. Bapak Kamiruddin MAg selaku ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau
8. Bapak Dr. Zulkifli MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Drs.H.Mohd.Yunus.MA selaku Penasehat Akaademis(PA),  
terimakasih atas nasehat-nasehat, serta pengalaman yang diberikan  
kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah  
banyak memberikan ilmunya selama perkuliahan.
11. Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada  
Camat Pujud beserta Staffnya dan Kepala desa Siarang-arang beserta  
para staf dan karyawan/i yang telah banyak memberikan bantuan dan  
informasi yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan  
penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada keluarga bang Iwan, Kak Eiges dan Jho.
13. Terima kasih juga buat adindaku tercinta serta teman-teman  
seperjuangan di jurusan Muamalah angkatan 2009 ada Mahrus, Zainal,  
Tanjung, Putra,Mui, Ilham, Vika, Siti, Intan, Yuliza, dan masih banyak  
lagi dan juga pada Angkt 2010, 2012, 2012 dalam suka maupun duka  
dan semua teman yang ada di fekon, tarbiyah, syari'ah, papertapet,  
psikologi, ushuludin, sains, dan teknologi. Mohon maaf bagi yang  
tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas  
segala bantuan, motivasi dan dukungannya selama ini sehingga penulis  
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
14. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan pada KKN  
angkatan XXVI di desa Siarang-arang yang telah bersama-sama baik  
suka maupun duka selama 2 bulan.

15. Buat sahabatku di Duri dan dipekanbaru juga keluarga besar dimana pun berada, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait serta bisa dijadikan pedoman bagi mereka yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

Pekanbaru,     Maret 2013

Penulis

**SADDAM HASRI**  
**NIM:10922007477**

## **ABSTRAK**

Keberadaan praktek Gadai lahan sawit dan karet merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu adanya praktek gadai lahan sawit dan karet tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari. Salah satu tindakan yang diambil masyarakat desa siarang-arang hingga sekarang ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dan keuangan adalah dengan menyelenggarakan traksaksi gadai.

Gadai lahan sawit dan karet sejak dulu telah memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal-hal tertentu, menggadaikan lahan sawit, bahkan jauh lebih penting dari pada yang lain. Praktek gadai lahan sawit dan karet yang terjadi dalam masyarakat melayu khususnya di desa Siarag-arang Kecamatan Pujud yaitu jika seseorang ingin meminjam uang maka lahan sawit atau karet miliknya dijadikan jaminan atau anggunan, kemudian lahan sawit atau karet tersebut dikelola oleh pemberi gadai dalam hal ini murtahin.

Penelitian ini mencoba mengetahui apakah paktek gadai lahan sawit dan karet di desa Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir serta pemanfaatannya telah memenuhi norma-norma hukum Islam. Untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum Islam maka praktek gadai lahan sawit dan karet yang dilakukan di desa Siarang-arang kecamatan Pujud tersebut dianalisis dengan prinsip muamalat Islam yakni dapat menghindari unsur-unsur garar, maisir, riba dan Eksploitasi (ketidakadilan).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yang dilaksanakan di desa Siarang-arang kecamatan Pujud. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-yuridis syar'iah yakni pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah gadai lahan sawit atau karet yang ada dalam masyarakat melayu khususnya di desa Siarang-arang kecamatan Pujud kemudian dibahas dan dinilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi gadai lahan sawit atyau karet pada masyarakat melayu di desa Siarang-arang kecamatan Pujud secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas barang gadai yang dijadikan jaminan sampai hutang dibayar, sementara rahin tidak mendapatkan bagian dari hasil gadai tersebut.

## ABSTRACT

Existence of Practice Mortgage sawit farm and rubber represent a[n habit that happened in life of society specially in Siarang-Arang countryside District of Pujud Sub-Province Rokan Downstream. Therefore the existence of practice mortgage sawit farm and the rubber can be told as an matter which cannot avoid. One of the siarang-arang countryside society pisaller until now this, in order to fulfilling monetary and urgent requirement is by carrying out pawn traksaksi

Farm sawit pawn and rubber since long time have played important role in life of society, in some respects, mortgaging sawit farm, even much more important from at is other. Practice mortgage sawit farm and rubber that happened in Malay society specially in Siarang-Arang countryside District of Pujud that is if someone wish to borrow money hence sawit farm or its property rubber is made by classyness or guarantee, later then sawit farm or the rubber of dikelolah by giver mortgage in this case murtahin.

This research try to know do paktek mortgage sawit farm and rubber in Siarang-Arang countryside district of Pujud Sub-Province Rokan Go downstream and also its exploiting have fulfilled norm punish Islam. To know do have as according to norm punish Islam hence practice mortgage sawit farm and done/conducted by rubber in Siarang-Arang countryside district of the Pujud analysed with Islam muamalat principle namely can avoid garar elements, maisir, Exploitation and lap ( ketidakadilan).

In this research use research of field executed by in Siarang-Arang countryside district of Pujud. While approach weared by is approach of syar'iah sosiologis-yuridis namely approach used to see a[n problem of sawit farm pawn or existing rubber in Malay society specially in Siarang-Arang countryside district of Pujud is later;then studied and assessed with principles punish Islam.

But after checking this yield conclusion that principal applying of syari'ah in transaction mortgage rubber atyau sawit farm at Malay society in Siarang-Arang countryside district of Pujud as a whole not yet as according to syari'ah norm because still there are exploitation element ( ketidakadilan) namely at intake of benefit to the goods mortgage taken as guarantee until debt paid, whereas rahin do not get the part of result of the pawn.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	9
D. Sistematika penulisan .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA SIARANG- ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

A. Sejarah Singkat Desa Siarang.....	15
B. Keadaan Geografis Daerah.....	16
C. Sosial Ekonomi.....	19
D. Pendidikan dan Kehidupan beragama .....	22
E. Sosial Budaya Masyarakat .....	26

### **BAB III : TINJAUAN STUDI PUSTAKA**

A. Definisi Gadai.....	29
B. Dasar Hukum Gadai .....	32
C. Rukun dan Syarat Sah dan Akad Gadai Syariah .....	33
D. Fatwa-fatwa tentang Gadai Syariah .....	36
E. Mekanisme Operasional gadai .....	38

### **BAB IV : PEMANFAATAN BARANG GADAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGGAJAI**

A. Bagaimana mekanisme pengadaian lahan sawit dan karet di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir...	39
B. Bagaimana dampaknya terhadap prekonomian penggadaai dan masyarakat di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir .....	46
C. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan hasil gadai lahan sawit di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir .....	50

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Pinjaman di Pegadaian syariah.....	6
Tabel,I.2	Pegadaian Masyarakat Desa Siarang-arang.....	7
Tabel,II.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku.....	17
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Siarang-arang.....	18
TabelII.3	Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	19
TabelII.4	MataPencaharian Penduduk.....	20
Tabel II.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	22
Tabel II.6	Fasilitas Penduduk di Desa Siarang-arang.....	23
Tabel II.7	Agama Penduduk di Desa Siarang-arang.....	24
Tabel II.8	Rumah Ibadah di Desa Siarang-arang.....	25
Tabel IV.1	Pemahaman Penggadaai Terhadap Gadai.....	39
Tabel IV.2	Mekanisme Gadai Lahan Sawit dan Karet.....	40
Tabel IV.3	Tanggapan Penggadaai Mengenai Perbandingan Harga Pinjaman Terhadap Hasil yang Diambil Pemegang gadai.....	41
Tabel IV.4	Tanggapan Penggadaai mengenai Konsekuensi Yang Akan Diterima Selama Hasil Diambil.....	42
Tabel IV.5	Dampak Penggadaai Terhadap Kebutuhan Keluarga.....	43
Tabel IV.6	Pekerjaan setelah Menggadaikan lahan Sawit atau Karet.....	44
Tabel IV.7	Dampak terhadap Sosial Penggadaai.....	45
Tabel IV.8	Alasan Masih Mau Melakukan Transaksi Gadai.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Pengesahan Skripsi
- Surat Izin Riset Provinsi Riau
- Surat Izin Riset Kabupaten Rokan Hilir
- Surat Izin Riset Kecamatan Pujud
- Surat Izin Riset Desa Siarang-Arang
- Dispensasi Buku
- Keterangan Kompre
- Jurnal Hukum Islam Dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
- Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kehidupan manusia hadir di muka bumi ini banyak menghadapi masalah untuk tetap bisa hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya maka manusia itu harus selalu berusaha dan saling tolong menolong.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dibidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain. Juga menggariskan metode yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut,<sup>1</sup> Juga masalah mu'amalah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Sadar atau tidaknya kita bahwa Al-Qur'an dan Hadits telah memiliki daya jangkau dan daya atur universal,serta teksnya yang selalu tepat berimplikasi di dalam kehidupan manusia. Sebagai landasan masalah tersebut Allah menganjurkan manusia agar saling membantu sesamanya. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat al-Maidah potongan ayat yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نُوَاعَاوِ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya :Dan tolong menolong kamu kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah :2).*

---

<sup>1</sup>. Syaikh Muhammad bin Jamnil Zainul,Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat,(Jakarta:Darul Haq,2011),hal.4

Berdasarkan firman Allah di atas maka dapat diketahui bahwa sesama umat manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan diharamkan saling tolong menolong dalam kejahatan yang akan menimbulkan keburukan dan kemurkaan Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari diri dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan.

Dalam memperoleh rezeki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan madarat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman zahiliyah dahulu.<sup>3</sup>

Di antara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah pegadaian (gadai) atau istilah dalam bahasa arab *rahn*. Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan diri suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan

---

<sup>2</sup> Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syariah* (Pekanbaru: Susqa Press: 2008) hal: 9

<sup>3</sup> Taufik Rahman, *Hadits-hadits Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal 131

boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>4</sup> Gadai(Rahn) memberikan bentuk jaminan modren bagi kreditur kemudian hanya mengikat pada penyerahan dan dapat diberikan untuk menjamin kewajiban meskipun mengikat tapi masih belum ditetapkan secara pasti. Ada dua keterbatasan utama Rahn yakni dikehendaki agar kreditur mengambil kepemilikan barang gadaian. Penerima gadai tidak berhak menggunakan gadai tersebut kecuali dengan izin penggadai, dan batasan ini tidak berlaku pada pinjaman qard. Keterbatasan lainnya adalah bahwa jika gagal, penggadai tidak berhak menjual gadaian tersebut untuk melunasi hutangnya tanpa izin dari debitur atau pengadilan.<sup>5</sup>

Jika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan keberbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utama adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif terlalu lama. Di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Dengan demikian masyarakat pedesaan lebih mencari solusi dan beranggapan bahawa menggadaikan hartanya berupa lahan sawit dan karet kepada orang yang mempunyai keuangan bisa membantu kebutuhannya pada waktu itu. Walaupun ada lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang jasa berbentuk

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Pres, 2005), hal. 88.

<sup>5</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hal 133.

pinjaman uang dengan memberikan jaminan. Lembaga keuangan tersebut dinamakan Perum Pegadaian.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti hewan-hewan akan ada kewajiban tambahan. Tambahan terhadap barang gadaian dikarenakan makanan yang diberikan kepada barang yang digadaikan, jadi yang diperbolehkan dalam meminta biaya dalam barang gadaian apabila adanya upaya pemeliharaan dalam barang gadaian tersebut.<sup>6</sup>

Kadang-kadang kelaziman suatu akad datang dari satu pihak saja, artinya akad bisa menjadi lazim jika datang dari satu orang dan tidak yang lainnya seperti akad gadai, dimana jika akad sudah dianggap sempurna oleh pembuat akad, maka menjadi wajib bagi Rahin dan tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas ridha yang menerima gadaian.<sup>7</sup> Pengakuan hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain keduanya, tidak boleh diambil menjadi miliknya kecuali atas keridhoan orang yang memilkinya baik karena perhubungan yang jual beli dan lainnya maupun karena pemberian (sedekah, hibah, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya pemeliharaan. Hal itu

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press 2010) hal. 109.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara 2010) Hal. 22.

<sup>8</sup> Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 91



dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.<sup>9</sup>

Dilihat dari lembaga – lembaga pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan,<sup>10</sup> namun masyarakat lebih tetap beranggapan dan tidak mau mengetahui tentang lembaga pegadaian non perbankan dan tentunya sosialisasi pihak lembaga pegadaian non perbankan yang tidak ada sama sekali dipedesaan, khususnya di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Variabel biaya dalam pegadaian di masyarakat yang telah terjadi meliputi :

1. Biaya administrasi yang ditetapkan tidak ada.
2. Biaya sewa modal yang dihitung tidak ada.
3. Selama hutang yang belum dibayarkan kepada peminjam modal maka seluruh hasil yang dikeluarkan oleh harta yang digadaikan diambil oleh peminjam modal.
4. Apabila sang peminjam tidak bisa mengembalikan uang maka harta gadaian tersebut menjadi hak milik sang peminjam modal.

Variabel biaya dalam pegadaian syariah meliputi :

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hal. 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 119.

1. Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut

**Tabel 1**

**Penetapan Biaya Administrasi berdasarkan Besar Pinjaman**

**Di Penggadaian Syariah**

<b>Besar pinjaman</b>	<b>Biaya administrasi</b>
Rp. 20.000. - Rp. 150.000	Rp. 1.000
Rp. 155.000. – Rp. 500.000	Rp. 3.000
Rp. 505.000. - Rp. 1.000.000	Rp. 5.000
Rp. 1.050.000. - Rp. 10.000.000	Rp. 15.000
Rp. 10.050.000. - Rp. dan seterusnya	Rp. 25.000

**Tabel 2**  
**Pegadaian di Masyarakat**  
**Desa Siarang-arang**

<b>Bentuk Biaya</b>	<b>Pegadaian Masyarakat</b>
Besar Pinjaman	100% x Rp. 250.000.000 = Rp. 25.000.000
Biaya Administrasi	0% x Rp. 25.000.000 = Rp. 0
Biaya <i>ijaroh</i> dan bunga	Sepanjang lama pelunasan Selama masa pegadaian maka hasil dari harta (sawit dan karet) menjadi milik peminjam modal
Total Biaya	----

Pegadaian yang telah dilakukan kebiasaan masyarakat setempat khususnya di Desa Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir memberikan 100% dari taksiran barang jaminan tetapi selama hutang belum dibayarkan maka hasil dari harta tersebut menjadi hak milik pemberi pinjaman modal.

Pegadaian yang telah terjadi dimasyarakat desa Siarang-arang yang selama ini telah turun temurun dilakukan masyarakat dengan menggunakan bunga yang berbentuk pengambilan hasil harta selama hutang dibayarkan sama hukumnya dengan melakukan transaksi pada bank konvensional yang memakai bunga dan diharamkan oleh para ulama.

Pada saat sekarang ini banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana pinjaman sesuai dengan syariah Islam. Dari ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme penyaluran dan akibat dampak dari sistem yang telah dilakukan secara turun temurun dana pinjaman uang kepada pemilik modal kepada sipenggadai harta. Dimana penelitian ini dilakukan disebuah masyarakat Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Suatu perbuatan dalam masyarakat, apabila sudah dapat diaktegorikan dalam definisi kaedah ushul fiqh dapat dikatakan dan ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Diantara perbuatan yang hukumnya oleh Rosullah saw ditetapkan berdasarkan adat ialah yang telah diditerangkan dalam haditsnya.<sup>11</sup>

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengangkat Fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : **PENGAMBILAN HASIL GADAI LAHAN SAWIT DAN KARET SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGADAI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Desa siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)**

## **B. Batasan Masalah**

Dari indentifikasi masalah yang ada dimana banyak sekali faktor yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dan terbatasnya waktu, biaya dan tenaga peneliti serta analisis yang dikuasai maka permasalahan perlu dibatasi<sup>12</sup>,

---

<sup>11</sup> Abdul Mujub, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal.45.

<sup>12</sup> Hartono, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Nusa Media Yogyakarta 2011) Hal.25

maka permasalahan peneliti ini difokuskan kepada analisis gadai tanpa batas waktu yang telah berlangsung secara turun temurun di kehidupan masyarakat Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir kemudian dilihat bagaimana mekanisme menurut perspektif Fiqih Muamalah.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengadaian lahan sawit dan karet di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian penggada di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan hasil gadai lahan sawit di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pengadaian lahan sawit dan karet di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Untuk mengetahui dampaknya terhadap perekonomian penggada di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

- c) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan hasil gadai lahan sawit di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara pinjaman yang sesuai dengan syaria Islam.
- b. Untuk mengetahui Faktor dan mekanisme apa saja yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pegadaian?
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap prekonomian penggadai di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?
- d. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan hasil gadai lahan sawit di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan, adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

## 2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek sebagai penelitian ini adalah penggadaai, dan penerima gadai Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah mekanisme pada pengadaian lahan sawit dan karet tanpa batas sesama masyarakat di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

## 3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan penggadaian yang berjumlah 16 orang dan penerima barang gadaian/Juragan kisaran 3 orang. Dikarenakan jumlah populasi penelitian ini tidak banyak maka peneliti mengambil keseluruhan sampel. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Total Sampling (pengambilan sampel secara keseluruhan).

## 4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

## 5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif yaitu di mana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kuantitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung dengan pemuka agama, adat, dan pemerintahan setempat untuk mendapatkan informasi sesuai data yang diperlukan.
- c. Angket, yaitu penulis membuat berupa angket yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan dan akan dijadikan data primer.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis menjadikan buku-buku pokok sebagai bahan referensi.

## 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulka fakta-fakta khusus kemudian di analisa dan di uraikan secara umum.
- c. Deskriptif, mengungkapkan uraian atas fakta yang di ambil dari lokasi penelitian.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi, keadaan geografis daerah, penduduk, mata pencaharian, adat kebiasaan masyarakat.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG GADAI**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari penjelasan istilah, dasar hukum gadai, fatwa tentang rahn, Rukun dan syarat sah gadai, akad gadai dan mekanisme operasional gadai atau rahn.

### **BAB IV : PEMANFAATAN BARANG GADAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGADAI PADA DESA SIARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

Membahas tentang mekanisme penyaluran dana pinjaman gadai kepada masyarakat di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir, dampaknya terhadap penggadai serta tinjauan menurut perspektif Fiqih Mu'amalah terhadap pengambilan hasil gadai

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Siarang-arang

Desa siarang-arang adalah sebuah kepenghuluan di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Rokan Hilir aadlah salah satu kabupaten di provinsi Riau di Indonesia, dengan kotanya adalah Bagan Siapi-api. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Bagan Sinembah yang terdiri dari 19 desa, kecamatan Banko yang terdiri dari 17 desa, kecamatan Bangko Pusako yang terdiri dari 12 desa, kecamatan Batu Hampar yang terdiri dari 5 desa, kecamatan Kubu yang terdiri dari 15 desa, kecamatn Pasar Limau Kapas yang terdiri dari 6 desa, kecamatan Pujud yang terdiri dari 10 desa, kecamatan Rantau Kopar yang terdiri dari 4 desa, kecamatan Rimba Melintang yang terdiri dari 8 Desa, kecamatan Simpang Kanan yang terdiri dari 6 desa, kecamatan Sinaboi yang terdiri dari 4 desa, kecamatan Tanah Putih yang terdiri dari 10 Desa, kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang terdiri dari 4 Desa.<sup>13</sup>

Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh pemerintah pusat dengan dasar hukum UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

---

<sup>13</sup> .Data dari *Pemkab Rokan Hilir* yang diambil pada 4 Desember di Kantor Bupati Rokan Hilir.

## B. Letak Geografis Desa Siarang-arang

Desa Siarang-arang berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai luas 20.000 Km<sup>2</sup> yang mempunyai 8 Dusun serta terdiri dari 32 Rukun Waega dan 96 Rukun tetangga dengan jumlah penduduk 4987 jiwa yang terdiri dari 1045 kepala Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kepenghuluan Sukajadi
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kepenghuluan Air Hitam
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kepenghuluan Teluk Nayang
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan kepenghuluan Menggala Sakti<sup>14</sup>

Penduduk yang berdomisili di Desa Siarang-arang matoritas suku Melayu yang merupakan penduduk asli. Sebagian lagi adalah suku Jawa, Batak, Minang, Nias, Bugis, Cina(Tiong Ha) yang merupakan penduduk pendatang dari luar daerah. Pada umumnya daerah Siarang-arang berada pada lintasan Timur menuju Kota Medan. Sedangkan masyarakat pendatang seperti Suku Jawa, Batak, Nias, Bugis berada di wilayah perkebunan sawit atau karet milik perusahaan di daerah sana. Untuk lebih jelasnya lagi masyarakat desa Siarang-arang diklafikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel ke 3 berikut.

---

<sup>14</sup>. Dokumen Kantor Desa, *Batasan Wilayah, Desa Siarang-arang*, Tanggal 12 Desember 2012.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku**

<b>No</b>	<b>Nama Suku</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Melayu	1986	39,75 %
2	Jawa	987	19,75 %
3	Batak	975	19,60 %
4	Cina (Tiong Ha)	864	17,30 %
5	Bugis, Nias	175	3,60 %
<b>Jumlah</b>		4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa siarang-arang secara umum banyak suku Melayu yang berjumlah 1986 orang dengan persentase (39,75%). Sedangkan suku paling sedikit yaitu suku bugis dan nias yang berjumlah 175 orang . Karena pada umumnya masyarakat desa Siarang-arang banyak pendatang dari Jawa, hingga sejak itu bahasa Jawa dan lainnya mulai berkembang.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk dari Desa Siarang-arang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dibagi kepada 4 tingkatan umur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Siarang-arang**

<b>No</b>	<b>Tingkatan Umur</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase</b>
1	0-5 Tahun	765	15,50 %
2	6-17 tahun	1414	28,28 %
3	18-40	1932	38,70 %
4	41 keatas	876	17,52 %
<b>Jumlah</b>		4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari segi umur yang paling banyak di desa Siarang-arng adalah orang dewasa yang berumur 18-40 tahun yaitu sebanyak 1932 orang dengan persentase(38,70%) . Sedangkan yang paling sedikit adalah umur 0-5 tahun sebanyak 765 dengan persentase(15,50%).

Penduduk desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dilihat dari tabel 5 dibawah ini:

**Tabel 3****Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di desa Siarang-arang**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	2768	55,36 %
2	Perempuan	2219	44,64 %
<b>Jumlah</b>		4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel diatas 5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis perempuan, yaitu laki-laki 2768 orang dengan persentase (55,36%) sedangkan jumlah perempuan 2219 orang. Dengan persentase (44,64%).

**C. Sosial Ekonomi**

Masyarakat yang berada di desa Siarang-arang adalah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yaitu Melayu, Jawa, Minang, Batak, Cina, Bugis, Nias. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Siarang-arang dilihat dari sistem sosialnya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang berlangsung didalam masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, jual beli, mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong menolong, bergotong royong dan lain sebagainya.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari suatu kondisi prekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi

ekonomi sangat penting guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan yang dilaksanakan. Didalam tingkat prekonomian, yang dilakukan adalah usaha pertumbuhan pusat ekonomi mikro dan makro guna penunjang taraf kehidupan masyarakat sehari-hari.

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat desa Siarang-arang pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang berkecimpung pada pertanian dan perikanan, pertanian sebagai besar adalah karet dan kelapa sawit, sedangkan bidang perikanan sebagian masyarakat memanfaatkan sungai besar ( Sungai Rokan ) sebagai kerambah ikan dengan melakukan sistem penyewaan oleh masyarakat dengan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk desa Siarang-arang dapat dilihat pada tabel 6 berikut.



**Tabel 4**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Siarang-arang**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pemilik kebun Sawit	945	18,90 %
2	Pemilik kebun Karet	904	18,10 %
3	Nelayan	504	10,10 %
4	Pedagang	196	3,92 %
5	Pegawai Negeri Sipil/Honorer	125	2,50 %
6	Peternak	260	5,20 %
7	Swasta	69	1,38 %
8	Buruh harian lepas	119	2,40 %
9	Belum bekerja	1865	37,50 %
<b>Jumlah</b>		4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian desa Siarang-arang pada umumnya adalah pemilik kebun sawit dan karet yaitu dengan jumlah 1849 orang dengan persentase(37%). Dan ada yang sebagai nelayan sebanyak 504 orang dengan persentase (10,10%), sebagai pedagang sebanyak 196 orang dengan persentase (3,92), sebagai pegawai Negeri sebanyak 125 orang dengan persentase(2,50%), sebagai peternak sebanyak 260 orang dengan persentase(5,20%). Selain pekerjaan tersebut masyarakat desa siarang ada yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 69 orang dengan persentase (1,38%) dan bekerja buruh harian lepas sebanyak 119 orang dengan persentase

(2,40%) serta yang belum bekerja sebanyak 1865 orang dengan persentase(37,50%).

#### **D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama**

##### **a. Pendidikan**

Masyarakat desa Siarang-arang pada umumnya pandai menulis dan membaca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintah kecamatan pada desa Siarang-arang bebas dari Buta Aksara, namun demikian masyarakat desa Siarang-arang secara formal ada yang hanya bertamat Sekolah Dasar(SD), dan juga ada yang sampai pada Perguruan Tinggi(PT).

Untuk mengetahui secara terperinci tentang tingkat pendidikan penduduk desa Siarang-arang kecamatan Pujud, dapat dilihat dari tabel 7 dibawah ini.

**Tabel 5**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Siarang-arang**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Belum bersekolah	378	7,60 %
2	Tidak Tamat SD	134	2,70 %
3	Tamat SD	423	8,50 %
4	Tamat SMP/MTS	543	10,90 %
5	Tamat SMA/ALYAH	2763	55,38 %
6	AKADEMIK/PT	746	14,92 %
<b>Jumlah</b>		4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel diatas 7 diatas dapat dilihat bahwa di desa Siarang-arang kecamatan Pujud secara gambaran umum bahwa tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan penduduk adalah tamatan SMA/MA dengan jumlah 2763 orang dengan persentase(55,38%) . Dan tingkat pendidikan yang paling rendah tidak tamat SD yang dilatar belakangi dengan umur yang sudah lanjut usia dan bagi prekonomian yang sangat minim sebesar 134 orang dengan persentase 2,70%) .

Pendidikan sebagai prioritas dan penopang jalan hidup dalam masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti jual beli dan sosial.. pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya agar terciptanya generasi yang penuh wawasan akan luasnya ilmu. Adapun prasaran pendidikan yang telah dibangun sampai saat ini mulai dari TK hingga SMA untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 6**

**Fasilitas Pendidikan di Desa Siarang-arang**

No	Jenis sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	5 Buah
2	SD Negeri/Swata	6 Buah
3	SMP Negeri/Swasta	3 Buah
4	SMA Negeri/Swasta	1 Buah
<b>Jumlah</b>		15 Buah

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Siarang-arang Kecamatan Pujud cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 15 buah sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan paling banyak SD dengan jumlah 6 buah sedangkan yang paling sedikit adalah sarana SMA berjumlah 1Unit.

#### **b. Agama**

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia. Kebebasan beragama beragam di Negara Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu diwujudkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama dan saling menghargai antar sesama umat.

Agama mayoritas di desa Siarang-arang adalah Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada tekanan atau interpersi dari pihak manapun dalam pemaksaan dari agama mayoritas terhadap agama minoritas. Hal ini membuktikan telah terwujudnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan sila dasar negara pancasila yang majemuk akan keragaman agamanya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel 9 dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Agama Penduduk di Desa Siarang-arang**

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2973	59,46 %
2	Kristen	975	19,60 %
3	Budha	864	17,28 %
4	Protestan	175	3,66 %
5	Hindu	-	
	<b>Jumlah</b>	4987	100 %

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Siarang-arang mayoritas agama yaitu 2973 orang dengan menganut agama Islam dengan persentase (59,46%), dan yang paling minoritas adalah dengan jumlah 175 orang menganut agama Protestan dengan persentase(3,66%). Untuk menjalankan kegiatan agama tentu memerlukan penunjang sarana dan prasarana yang diperlukan seperti tempat ibadah. Tempat peribatan ini selain dari tempat ibadah juga sebagai center ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka mensosialisasikan suatu pesan dan perkembangan pembangunan pemerintahan kepada masyarakat luas.

Dari 4 agama yang dianut masyarakat desa Siarang-arang Kecamatan Pujud ternyata tidak semua agama mempunyai dan memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

**Tabel 8**  
**Rumah Ibadah di Desa Siarang-arang**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	13 Unit
2	Mushalla/Rumah Suluk	6 Unit
3	Gereja	3 Unit
4	Wihara	-
5	Pura/Kuil	-
	<b>Jumlah</b>	22 Unit

*Sumber: dokumen Kantor Desa Siarang-arang, 2012*

Dari tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) buah rumah ibadah dari 4 (Empat) agama yang dianut oleh penduduk desa Siarang-arang yaitu Masjid yang dimiliki oleh umat Msulim dengan jumlah 19 unit yang terdiri dari 13 masjid dan 6 mushallan rumah suluk dan 3(tiga) unit gereja untuk peribatan umat kristiani dan protestan sedangkan agama lainnya belum ada sampai saat ini.

#### **E. Sosial Budaya masyarakat**

Masyarakat Siarang-arang terdiri dari beberapa suku, suku aslinya Melayu. Sedangkan pendatang adalah suku Jawa, Batak, Cina, dan lain-lain. Beberapa suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku serta menghormati adat dan kepercayaan yang dianut yang lainnya.

Pada umumnya setiap seluruh insan lapisan msyarakat memiliki ciri khas masing-masing adat istiadat dari suku itu sendiri. Hali ini menunjukkan luasnya kebudayaan yang dimiliki masing-masing lapisan etnis.

Selain itu mereka juga pernah melakukan kombinasi adat istiadat yang dimiliki dalam suatu acara tertentu seperti halnya acara pernikahan, penyambutan tamu, sunatan dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat desa Siarang-arang tidak terlepas dari arahan atau keikutan serta para tokoh pemuka agama, adat, dan sesepuh mereka dalam menengahi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Desa Siarang-arang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang identik dengan beragam suku, dan budaya. Sudah barang tentu memiliki adat dan istiadat yang berlaku secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari segi bahasa yang menonjol berbahasa Melayu walaupun ada dari mereka yang bersuku lain tetap menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu mereka.. demikian pula kesenian yang ada di daerah tersebut adalah kesenian adat melayu, seperti halnya:

1. *Barzanji*, biasanya dibacakan saat adanya kelahiran bayi, yaitu tepatnya hari ketujuh kelahiran bayi dan pada acara pernikahan serta khatamul Qur'An bagi yang sudah beranjak baliqh.
2. *Tarian zapin*, tarian adat riau yang diperlihatkan ketika acara penyambutan tamu penting dan orang-orang yang dari jauh datang ke Siarang-arang dan juga dalam acara pernikahan putra dan putri mereka.

3. *Pencak silat*, yaitu olahraga bela diri yang sering diperlihatkan ketika penyambutan tamu penting dan dalam acara pernikahan.

Namun dengan demikian kehadiran kesenian tersebut pada masa sekarang tidak semarak lagi dimasyarakat, disebabkan oleh adanya kesenian dari luar yang dianggap lebih modern sehingga sering terlupakan kesenian sendiri yang perlu selalu dijaga.



### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS TENTANG GADAI (RAHN)

##### A. Definisi Gadai

*Abdul Husain* menyatakan bahwa pinjaman secara Epistemology berarti : pembayaran harta kepada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan.<sup>15</sup> Pinjaman berlaku pada pakaian, hewan, setiap barang yang dapat ditimbang, semua barang dagangan yang diperbolehkan pemesanannya.<sup>16</sup>

Menurut *Abu Sura'i Abdul Hadi* dari ahli Fiqih hutang/pinjam adalah transaksi antara dua pihak uang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.<sup>17</sup>

Macam-macam pinjaman dinyatakan oleh *Abu Sura'i Abdul Hadi* yaitu dilihat dari segi ekonomi terdiri dari.<sup>18</sup>

1. Pinjaman yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan penting.
2. Pinjaman yang dilakukan oleh pedagang untuk menambah modal.
3. Pinjaman pemerintah kepada pihak luar.

---

<sup>15</sup> Abdul Husein at-tariqi Abdullah, *Ekonomi Islam :Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Megistra Insania Press.2004). hal. 268.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 269.

<sup>17</sup> Abu sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Iklas, 1993), hal.125.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 139.

Menurut *Muhammad Muslehuddin* berdasarkan hukum Islam pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Hal ini telah dijabarkan oleh Aisyah, istri Nabi saw, yang menyatakan bahwa nabi saw pernah membeli makanan untuk keluarganya dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi (baju penutup dada).<sup>19</sup>

Adapun pengertian *Rahn* menurut *Abdul Ghopur* yang diambil dari Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah : sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarkan dari orang yang berpiutang. Kemudian diambil lagi dari Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>20</sup>

Dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) dikenal beberapa istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. *Rahn* dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (Islam) terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai yaitu sebagai berikut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal 88.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshory, *Gadai Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 88

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management, Conventional & Sharia System* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 1340.

## 1. *Rahn*

a. *Rahn* artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab. *Rahn* berarti : pinjaman penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat konkret (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut Mazhab Syafi'I dan Hambali, harta dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.<sup>22</sup>

b. *Rahn* adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, di mana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya unga pinjaman. Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah diperlakukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaann dengan sistem manajemen modern yang mencerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga asaz ini diselaraskan dengan niali-nilai Islam sehingga dapat berjalan seiring dengan terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

c. *Murtahin* adalah : pemilik dana (perum pegadaian) yang memberikan pinjaman kepada *rahn* dengan menerima barang dengan jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada *rahn*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 1340.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

d. *Marhun* adalah harta atau barang yang dijadikan sebagai *rahn*/ jaminan (di rahn kan ), yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/bertahan lama, umpamanya emas perhiasan atau emas batangan, barang-barang elektronik, dan kendaraan bermotor.<sup>25</sup>

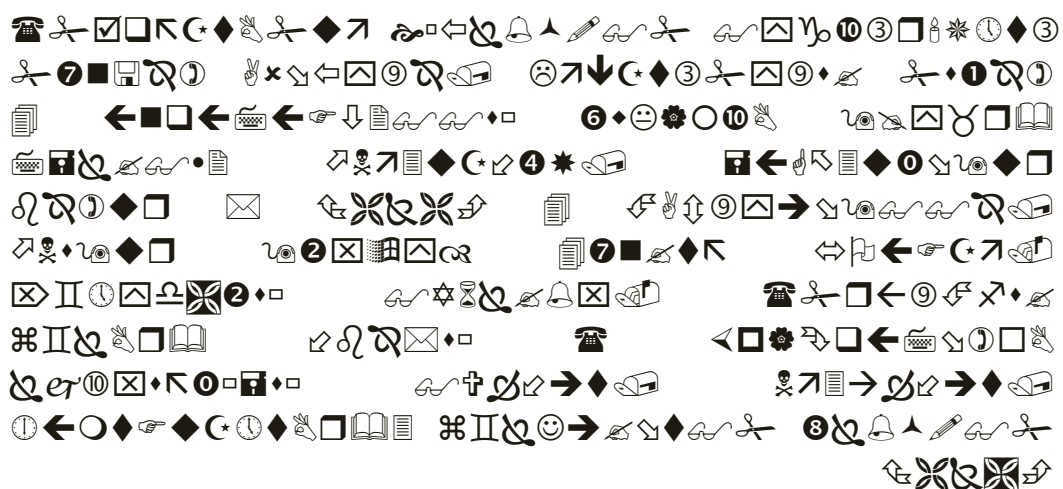
Dari beberapa pengertian *Rahn* maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *Rahn* adalah menahan harta salah satu pemilik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan atau gadai.

## B. Dasar Hukum Gadai

Menurut *Abdul Ghafar* menyatakan bahwa : Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalm Al-qur'an, sunnah dan ijtihad.<sup>26</sup>

### 1. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS, Al-Baqarah ayat 282dah 283 yang berbunyi :



<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Abdul ghofur, *op. cit.*, hal. 89

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.(282)Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan dipegang oleh yang berpiutang. (283)*

---

## 2. As-Sunnah/Dalil

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminta darinya gandum, orang Yahudi tersebut berkata : sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku. Rasulullah kemudian menjawab :*“Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur diatas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika aku berikan amanat kepad ku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku meneminya”*.

## 3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini jimhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian berargumentasi pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

## 4. KUHPerdata

Berkaitan dengan gadai ini, terdapat didalam KUHPerdata BAB 20 No 1150 sampai dengan 1161 yang menerangkan pengertian gadai hingga mekanisme gadai.

## C. Rukun dan Syarat Sah dan Akad Gadai Syariah

Dalam hal ini *Abdul Ghofur* menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. *Ijab Qabul (sighot)*

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) :

- a. Telah dewasa
- b. Berakal
- c. Atas keinginan sendiri

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- a. Dapat direrah terimakan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 91.

g. Harga yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakar Jabir al-Jazari dalam buku '*Minhajul Muslim*' menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya, yang belum masak karena penjual tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan karena didalamnya tidak memuat unsur gharar bagi *murtahin*.

#### 4. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alat gadai adalah :

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *marhun*

#### 5. Akad Gadai Syariah

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :<sup>28</sup>

1. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hal. 122.

2. *Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut *Sunarto* pendapatan yang diterima dari transaksi *Ijarah* tersebut *ujrah*, *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diberikannya.<sup>29</sup>

Dalam produk syariah ada yang menggunakan akad *Murabahah* yang menurut *Antonio Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>30</sup>

#### **D. Fatwa-fatwa tentang Gadai Syariah**

##### **1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 43.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.101.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 113.



- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - e. Penjualan *marhun*
    - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
    - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
    - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan berkurangnya menjadi kewajiban *rahin*.
- f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### E. Mekanisme Operasional Gadai

Menurut *Muhammad* berjalan perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal, diantara hal tersebut adalah sunjek dan objek perjanjian gadai. Subjek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Objeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.<sup>32</sup>

Mekanisme perjanjian gadai atau *rahn* ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait diantaranya :<sup>33</sup>

1. Syarat rahin dan murtahin
2. Syarat marhun dan hutang
3. Kedudukan marhun
4. Resiko atau kerusakan marhun pemindahan milik marhun
5. Pelakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
6. Pemungutan hasil *marhun*
7. Biaya pemeliharaan umum pembayaran (jiwa-nebus) utang dari *marhun*
8. Hak *murtahun* atau harta peninggalan.

---

<sup>32</sup> Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 91.

<sup>33</sup> *Ibid.*

---

## **BAB IV**

### **PEMANFAATAN BARANG GADAI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGGAJAI**

#### **A. Mekanisme Pengadaian Lahan Sawit Dan Karet Di Desa Siarang-arang**

Sawit dan karet merupakan salah satu bentuk hasil dari kerja keras manusia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam konteks berkebun. Dengan adanya sawit dan karet tersebut, hasilnya dapat dipergunakan untuk membelikan sesuatu yang diinginkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti perawatan rumah, pembelian mobil, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan mendesak.

Walaupun dengan adanya penghasilan masyarakat dengan hasil lahan sawit atau karet, ternyata kebutuhan manusia makin harinya tidak bisa ditentukan secara rinci, sehingga timbul kebutuhan secara mendadak yang membutuhkan dana yang cukup besar dan menghancurkan para petani untuk menggadaikan sawit ataupun karetnya sebagai jamina. Masyarakat yang mau menerima jaminan gadai tersebut, dibubuhi dengan beberapa syarat yang sangat

memberatkan petani. Sehingga menimbulkan tidak sesuai dalam akad gadai yang seharusnya saling menguntungkan dan tidak terzolimi antara penggadai dan pemegang gadai. Kebutuhan yang mendesak tersebut, para petani terpaksa menggadaikan sawit atau karetanya, dengan syarat selama hutang belum dilunasi maka hasil dari gadai tersebut menjadi pemegang gadai<sup>34</sup>.

Ulama' sepakat bahwa di dalam gadai berdasarkan syariah atau tuntunan yang telah diajarkan oleh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi juga pernah menggadaikan hartanya dan memberikan jaminan kepada seorang yahudi di madinah.

Sebelum kita masuk kedalam mekanisme, para penggadai mempunyai jawaban terhadap pemahaman gadai seperti tabel dibawah ini:

**TABEL 1**  
**Pemahaman Penggadai Terhadap Gadai**

NO	Jawaban	F	Persentase
1	Paham	3	18,75 %
2	Sedikit Paham	8	50 %
3	Tidak Paham	5	31,25 %
	Jumlah	16	100 %

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dengan melihat tabel pemahaman diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian besarnya para penggadai menyatakan paham terhadap gadai sebanyak 3

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dari penggadai pada tanggal 21 desember 2012.

orang dengan persentase (18,75%) . Alasan responden mengatakan paham karna pernah mempelajari gadai dengan membaca buku, yang menyatakan sedikit paham sebanyak 8 orang dengan persentase (50%), dengan alasan pernah mendengar penjelasan gadai di tv. Selanjutnya yang menyatakan tidak paham sebanyak 5 orang dengan persentase(31,25%), alasanya mengatakan demikian adalah tidak tahu, akibat dari permasalahan pemahaman tentang gadai berindikasi kepada mekanisme pengadaian.

Dapat juga kita lihat pada tabel dibawah ini bagaimana mekanisme gadai lahan sawit atau karet di desa Siarang-arang sebagai berikut:

**TABEL 2**

**Mekanisme Gadai lahan Sawit dan Karet**

NO	Jawaban	F	Persen tase	Contoh Kasus
1	Sangat Mudah	16	100%	Tgal 21 Januari 2006 Sdri talbiyah dtang kpada H.Pian Meminjam uang dengan membwa syarat KTP dan Surat keterangan kpemilikan karet 1Ha kepda H.Pian dengan mndapatkan pinjaman sebesar 10Jt.selma hutang terlunasi maka hasil dari kebun karet diambil oleh H.Pian dengan menandatangani perjanjian diatas kwitansi, dan H.Pian memberikan uang pnjaman dngan terhitung tgal 22 Jan 2006 lahan karet telah mnjadi hak milik H.Pian.
2	Biasa-biasa saja	-	-	
3	Susah	-	-	
	Jumlah	16	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan terhadap mekanisme pegadaian di desa Siarang-arang sangatlah mudah dengan alasan responden bahwa seluruh cara menggadaikan lahan sawit dan karet sangatlah mudah hanya dengan saling kepercayaan tanpa memerlukan persyaratan yang berbeli-belit.

Dilihat dari tanggapan responden seluruhnya menjawab mudah menjadikan sebuah jawaban kedua bahwa masyarakat desa Siarang-arang sangat suka dengan mekanisme pegadaian tanpa persyaratan yang seperti yang diajukan oleh lembaga pegadaian.

Dibalik dari kemudahan mekanisme, terdapat ketidak sesuaian kepada penggadaai. Penggadaai melakukan perjanjian selama belum terlunasi utang tersebut, hasil gadai diambil oleh pemegang gadai.

**TABEL 3**

**Tanggapan Penggadaai Mengenai Perbandingan Harga Pinjaman Terhadap Hasil Yang Diambil Pemegang Gadai**

NO	Jawaban	Banyak	Persentase	Contoh Kasus
1	Sangat rugi	-	-	Sdr I Talbiyah melunasi hutangnya selama 1thun.slama itu hasil karet yg diperkirakan bisa mncapai 10Jt.sdangkan uang yg dpinjam hanya 10Jt.perbandingan harga pnjama mencapai 2 x lipat.
2	Rugi	14	87,50 %	
3	Tidak Rugi	2	12,50 %	Sdr Ia hnya meminjam uang sbesar 3Jt. Ia dpat mlunasi hutangnya slama 1Bln.Kbutuhannya' mndesaknya bisa terpenuhi sdngakan hasil karetnya tidak lama diambil oleh H.Pian.
	Jumlah	16	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menyatakan rugi melakukan pegadaian sangatlah tinggi dengan 14 orang dengan persentase(87,50%), dengan alasan responden selama hasil gadai diambil mereka tidak bisa menafkahkan

keluaraganya dengan baik seperti sebelum menggadaikan. Dan yang menyatakan tidak rugi telah melakukan pegadaian sebanyak 2 orang(12,50%), dengan alasan telah dibantu kesulitannya diwaktu dibutuhkan secara mendesak.

**TABEL 4**

**Tanggapan Penggadai Mengenai Konsekuensi Yang Akan Di Terima**

**Selama Hasil Di Ambil**

NO	Jawaban	F	Persen tase	Contoh Kasus
1	Sangat khawatir	-	-	Sdri Talbiyah menerima konsekuensi atas pminjam uang kpada H.Pian dgn menggadaikan Karetnya,slamakaretnya digadaikan hasil diambil oleh H.Pian dan berkurangnya pnghasilannya slama hutang belum terlunasi.
2	Khawatir	1 3	81,25 %	
3	Biasa-biasa saja	3	18,75 %	Sdr Ia mnerima konsekuensi atas pminjaman uang hanya selama 1bln setelah itu ia berhak mengambil karet yang digadaikan kepada H.Pian.
	Jumlah	1 6	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat diketahui penggadai yang menyatakan khawatir terhadap konsekuensi yang akan diterima sama dengan hasil tabel sebelumnya sebanyak 13 orang dengan persentase (81,25%) dengan alasan bagaimana penghasilan yang akan diperoleh setelah menggadaikan tersebut, karena terpaksa tetap harus menggadaikan lahannya. Responden dengan jawaban biasa-biasa saja sebanyak 3 orang(18,75%) dengan beralasan bahwa sesudah lahan diambil,

mereka bisa mencari pekerjaan lain yang bisa menutupi kebutuhan keluarga mereka serta mengumpulkan uang untuk melunasi hutang.

Sebelum penggadaai memperoleh pinjaman dimasyarakat, terlebih dahulu harus melalui prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, prosedur tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini<sup>35</sup>:

- a. Pengadaai datang kepada juragan/yang dianggap bisa memberikan pinjaman kepada dia serta membawa barang jaminan baik berupa emas, atau surat kepemilikan lahan sawit atau karet yang akan digadaikan dan yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan serta membawa identitas dari yang masih berlaku seperti, KTP, dan lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan uang pinjaman sebesar harga jaminan yang digunakan setelah ditaksirkan oleh juragan tersebut.
- b. Barang yang bisa dijadikan untuk mendapatkan pinjaman yaitu emas maupun sawit ataupun karetnya sesuai dengan nilai harga dan memiliki kriteria yang ditentukan oleh juragan tersebut sehingga pantas dijadikan sebagai jaminan yang bisa digadaikan.
- c. Pegadai menandatangani surat perjanjian yang telah ditulis sesuai dengan kesepakatan bersama, dan menyerahkan foto copy tersebut yang telah ditandatangani oleh penggadaai dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan kepada juragan tersebut.

---

<sup>35</sup> Talbiyah (salah satu yang sering mealkukan penggadaai),wawancara pada tanggal 21 Desember Jam 15:21 di kediaman Talbiyah



- d. Juragan ataupun penerima gadai memberikan pinjaman sesuai dengan taksiran barang jaminan yang diberikan oleh pegadai.
- e. Juragan menentukan biaya administrasi yakni mengambil hasil gadai selama hutang sampai dibayar lunas sesuai waktu yang telah ditentukan secara bersama dan ditandatangani oleh saksi yang telah ditunjuk.
- f. Penggadai menerima surat bukti gadai dan mendatangi akad gadai
- g. Kemudian penggadai menerima uang pinjaman sebesar yang diminta oleh penggadai
- h. Pinjaman ditetapkan jatuh tempo selama 6 bulan dan 12 bulan dan mulai hari esoknya hasil sawit ataupun karet sah diambil oleh penerima gadai.
- i. Bila dalam jangka tempo waktu pinjaman tidak dikembalikan maka pihak juragan atau penerima gadai menghubungi dengan telpon kepada penggadai untuk pemberitahuan barang jaminan akan diambil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani sebelumnya.
- j. Barang jaminan tersebut diambil dan sah menjadi pemilik juragan dan dibayarkan setelah dikurangi dengan hutang yang belum terbayar.

Dengan seharusnya sawit atau karet yang dimiliki dapat menghasilkan uang yang bisa membayarkan hutang secara lunas dengan waktu yang cepat menjadi waktu yang menjadi lama.

### B. Dampak Terhadap Prekonomian Penggadaai

Dampak prekonomian setelah menggadaikan sesuatu barang kepada pemegang gadai sebenarnya dapat kita analisa dikarenakan seluruh permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan keadaan kebutuhan manusia

Adapun alasan ataupun motivasi untuk menggadaikan lahan mereka bermacam-macam, hasil penelitian di desa Siarang-arang mereka yang menggadaikan lahannya menggunakan uang tersebut untuk keperluan produktif dan kebutuhan mendesak seperti dana pernikahan serta membayar hutang.

**TABEL 5**

#### **Dampak Penggadaai Terhadap Kebutuhan Keluarga**

<b>N O</b>	<b>Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>	<b>Contoh Kasus</b>
1	Serba kekurangan	13	81,25 %	Slama karet digdaikan,kbtuhan keluarga Sdri Talbiyah mnjadi susah,karna pmasukan uang dari karet tidak didapatkan lagi diambil sehingga semua kbtuhan tidak dapat terpenuhi dan makan sesuai dengan yg ada.
2	Kadang kekurangan	3	18,75 %	Sdr.Tukirem mngalami sedikit kekurangn dalam kbtuhan keluarga karena sawitnya yg dulu 2Ha telah berkurang karena telah digadaikan 1Ha kpada H.Pian
3	Biasa saja	-	-	
	Jumlah	16	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa yang menyatakan situasi serba kekurangan sebanyak 13 orang dengan persentase (81,25%), dengan hal tersebut

pegadaian lahan sawit atau karet memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kebutuhan keluarga karena penghasilan mereka menjadi berkurang. Responden yang menjawab situasi biasa-biasa saja sebanyak 3 orang dengan persentase (18,75%) dengan alasan mereka masih punya lahan yang bisa diambil hasilnya dan melakukan usaha lain untuk menutupi kebutuhan tersebut.

**TABEL 6**

**Pekerjaan Setelah Menggadaikan Lahan Sawit Atau Karet**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Banyak</b>	<b>Persentase</b>
1	Wirausaha	1	6,25 %
2	Nelayan	4	25 %
3	Petani	11	58,75 %
	Jumlah	16	100 %

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan menjadi petani atau pengambilan upah lahan sawit dan karet orang lain sebanyak 11 orang dengan persentase yang paling tinggi (58,75%), dengan demikian dampak dari penggadaian ini sangatlah buruk bagi pekerjaan mereka untuk menghidupi keluarga. Responden yang menjawab berdagang sebanyak 1 orang(6,25%), nelayan sebanyak 4 orang (25%). Alasan mereka melihat pekerjaan yang mereka bisa lakukan hanyalah itu.

**TABEL 7****Dampak Terhadap Sosial Penggadaai**

<b>N O</b>	<b>Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Perse ntase</b>	<b>Contoh kasus</b>
1	Sangat Malu	-	-	
2	Malu	6	37,50 %	Keluarga pak Itam mndapatkan sanksi cemehan dari tetngganya karena selalu sering pnjam uang dan berutang padawarung krena lahan karetanya telah digadaikan kepada Sutrisno sbsar 1Hr dan skrang brubah mnjadi nelayan disungai.
3	Biasa-Biasa saja	10	62,50 %	Kluarga Mian mrasa biasa saja setelah mnggadaikan sawitnya sluas1Ha krena masih mempunyai 3Ha sawit lagi yg sudah bisa siambil hasilnya.jadi msih bisa membri nafkah kpda keluarganya dgn luas swit 3Ha tersebut.
	Jumlah	16	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa yang menyatakan situasi merasa malu dihadapan sosial sebanyak 6 orang dengan persentas (37,50%) dengan alasan di masyarakat mereka dapat status sosial yang rendah dan cemohan. Keadaan penggadaai yang tidak berpengaruh kepada sosialnya sebanyak 10 orang(62,50%), dengan alasan mereka melakukan penggadaian demi kebutuhan keluarga dan dilakukan hanya untuk melangkapi kebutuhan mendesak, mereka merasa terbantu dengan adanya masyarakat yang mau meminjamkan uangnya dalam keadan terdesak dengan jaminan lahan walaupun di dalam prekonomian mata pencaharian mereka menjadi hilang.

**TABEL 8****Alasan Masih Mau Melakukan Transaksi Gadai**

<b>N O</b>	<b>Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Perse ntase</b>	<b>Contoh kasus</b>
1	Tidak ada cara lain	7	43,75 %	Sdri Talbiyah memberikan alasan karena lahan karetinya tidak mempunyai surat lengkap karena lahan tersebut adalah lahan warisan dari kakeknya dahulu.
2	Masih butuh	9	56,25 %	Sdr Mian msih mau melakukan pegadaian karena proses peminjaman tidak lama degan hanya saling kepercayaan kepada bapak Sutrisno
3	Tidak tahu	-	-	
	Jumlah	16	100 %	

*Sumber: hasil kuosioner dari penelitian di desa Siarang-arang 21 Desember*

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan bahwa tanggapan responden kenapa masih mau menggadaikan kebun sawit ataupun karetinya kepada sesama masyarakat dengan jawaban tidak ada cara lain sebanyak 7 orang dengan persentase (43,75%) dengan alasan lain karna kebutuhan tersebut secara mendesak dan tidak ada yang mau memberikan pinjaman kecuali dengan menggadaikan lahan yang dimiliki. Adapun responden yang menjawab yang masih butuh sebanyak 9 orang dengan persentase (56,25%) dengan alasan tidak ada lembaga keuangan yang mau menerima gadai dengan surat yang tidak lengkap dan proses yang sangat mudah.

Dari dampak yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwasanya penggadaian yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat desa Siarang-arang.

Sudah jelas memberikan efek yang sangat buruk baik dalam prekonomian maupun dalam keadaan sosial dalam masyarakat.

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengambilan hasil gadai lahan sawit di desa Siarang-arang.**

#### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Dalam bermuamalah ataupun melakukan transaksi hutang-piutang, kemudian tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi, maka hendaklah mewujudkan suatu bukti lain sebagai alat bukti atau penguat apalagi dalam perkara gadai. Dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga, sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai satu dan lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi perselisihan antara para yang bersangkutan.

Jaminan yang ada di tangan pihak pemberi pinjaman adalah amanah dan g tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang melunasi pinjamannya, maka jaminannya itu dapat dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada hakikatnya juga dianggap sebagai orang yang amanah sehingga bisa diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya itu tepat pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak memperoleh kerugian.

Para ulama telah bersepakat bahwa *rahn*/gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehnya, demikian pula dengan landasan hukumnya, di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>36</sup>

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para fuqaha barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik *marhun* (*rahin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rahin*.<sup>37</sup>

Para ulama fiqh juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasul SAW. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang

---

<sup>36</sup>.M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 52.

<sup>37</sup>.Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 55.

jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqh.

Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.<sup>38</sup>

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku. Berkaitan dengan hal di atas, Rasul SAW bersabda sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 257



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ  
 إِنْ كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الْإِذْرِ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِنْ دَاكَانَ مَرْهُونًا وَعَلَّ الْإِذْيُ يَرْكَبُ  
 وَيَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ ( )

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata bersabda Rosullah SAW:binatang tunggangan apabila digadaikan(dijaminkan) boleh dikendarai sebab memberi nafkahnya. Ternak perah yang digadaikan(dijaminkan)boleh diminum susunya sebab memberi nafkah. Bagi orang yang mengendarai serta meminum susunya wajib memberi nafkah (HR.BUKHARI).<sup>39</sup>*

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.<sup>40</sup> Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan

---

<sup>39</sup>. Terjemahan Abdul abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Abdul latif Asy Syiraji Az-Zubaidi, *Shahih Bukhari*, Juz I, hlm. 481

<sup>40</sup>. Khalil Umam, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 19.

penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.<sup>41</sup>

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwasanya segala risiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu *rahin*.<sup>42</sup> Karenanya setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلق لرهن  
من صاحبه اى رهنه له غنمه وعليه غرمه. {رواه الشافعى و

*Artinya: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala nya (kerusakan dan biaya)". (HR. Asy-Syafi'i dan Daruquthny).*<sup>43</sup>

Bagaimanapun mereka tidak sependapat mengenai jenis perbelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rahin*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tagihan pembelian yang mesti ditanggung oleh *rahin*, sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggungjawab menjaganya adalah sebagai berikut: segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh

<sup>41</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 53.

<sup>42</sup>. Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 178.

<sup>43</sup>. Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terjemahan Abdul hayyie al-kattani dkk Jilid V, (Jakarta: Gema Inani: 2011), hlm. 182.

pegadai (*murtahin*), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.<sup>44</sup>

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan penggembala jika barang jaminannya berupa binatang ternak dan juga bertanggungjawab atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah karena semua itu merupakan biaya dan perbelanjaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang.

Pegadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya.

Berdasarkan tanggung jawab tersebut, pegadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, (*jumhur*) berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (*rahin*).<sup>45</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata Bab 20 ayat 1150 sampai 1160 telah menjelaskan tentang gadai yang berisi sebagai berikut : 1150 : Gadai adalah suatu hak yang

---

<sup>44</sup>. *Ibid.*

<sup>45</sup>. *Ibid*, Wahbah az-Zuhaily hlm. 221-222

diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang piutang kepadanya. 1151 : Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang dibolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. 1154 : apabila siberutang atau sipemberi gadai tidak memenuhi keawajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah siberpiutang memilik barang yang digadaikan<sup>46</sup>

### 3. Solusi yang ditimbulkan dari permasalahan gadai di Desa Siarang-arang

Dari beberapa penjelasan diatas terdapat solusi dalam permasalahan ini sebagai berikut:

#### 1. Merubah akad gadai menjadi akad kontrak

Merubah akadnya menjadi kontrak agar lebih jelas sesuai dengan KUHPerrdata Bab I tentang perikatan 1233 sampai denan ayat 1312, Bab II 1313 sampai ayat 1351, Bab III 1352 sampai ayat 1380

#### 2. Merubah pemikiran masyarakat agar tidak meminjam uang lagi dengan menggadaikan lahanya kepada masyarakat.

Memberikan pengetahuan tentang dampak yang akan ditimbul dari tradisi gadai dengan info yang sesuai dengan KUHPerrdata.

#### 3. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan membuat lembaga pegadaian syariah agar masyarakat bisa meminjam sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>46</sup> KUHPerrdata, bab 20 ayat 1150-1161

Pemerintah setempat melakukan kerja sama dengan perusahaan pegadaian syariah untuk mendirikan cabang pegadaian syariah di desa tersebut agar membantu masyarakat desa Siarang-arang

4. Membuat seluruh lahan masyarakat mempunyai surat dan sertifikat agar mudah dalam meminjam uang ke lembaga pegadaian.

Pemerintah bekerja sama dengan notaris agar melakukan penyetaraan surat tanah dengan gratis seperti yang telah dilakukan sebagian wilayah provinsi lain.

5. Pemerintah memberikan pelayanan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Demi mengedepankan sikap profesionalisme para pegawai pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang kondusif dan tentram diciptakan pelayanan untuk menampung aspirasi masyarakat agar bisa didengar oleh para pemimpin.

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang penulis paparkan diatas , penulis dapat menyimpulkan sabagai berikut:

1. Masyarakat desa Siarang-arang apabila membutuhkan dana secara mendadak, mereka langsung menuju juragan/penerima gadai dikarenakan ada beberapa faktor membuat masyarakat tidak bisa menggadaikan lahannya kepada badan penggadaian resmi. Adapun alasan masyarakat yang membutuhkan dana tidak bisa meminjam kepada penggadaian syariah ataupun bank dikarenakan lembaga tersebut meminta jaminan kebun sawit atau karet mereka dengan surat-surat yang lengkap.
2. Terdapat dampak dari penggadaian di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud dalam segi ekonomi yang terdiri dari pendapatan bulanan dan pekerjaan setelah menggadaikan lahan sawitnya serta keadaan sosial dan psikis dari penggadai
3. Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. 40-58

## **B. Saran-saran**

Berkenaan dengan topik yang penulis angkat dalam penelitian di Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan gadai lahan sawit dan karet penulis menyarankan kepada masyarakat, agar memperhatikan terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan dalam pegadaian sesama masyarakat.

Kemudian disisi lain kepada para pengusaha pegadaian syariah dapat melakukan sosialisasi dan mendirikan usaha pegadaian syariah di daerah terpencil agar terhindar masyarakat terpencil dari perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kepada para pemuka agama, adat, pemerintah agar selalu memberikan pengetahuan tentang gadai sesuai dengan syariah seperti apa. Agar tugas pemimpin sebagai pengayom masyarakat terbukti di lapangan.

Kepada rekan-rekan mahasiswa disarankan agar lebih banyak melakukan penyajian terhadap masalah-masalah mua'malah agar bisa menjadi Sarjana Syariah yang berkompeten dalam bidangnya dan dapat menghadapi permasalahan mua'malah di zaman modern saat ini.